Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial
Volume 3, No. 2, June 2025 - September 2025, pp. 131-141
E-ISSN: 2987-4475
https://pchukumsosial.org/index.php/pchs

Pengujian Perundang–Undangan : *Legislative Review Executuve Review* dan *Judicial Review*

Wilma Silalahi[1*], Yunita Estu Lestari[2]

[1,2] Universitas Tarumanagara Jakarta, Letjen S. Parman St No.1, RT.6/RW.16, Tomang, Grogol petamburan, West Jakarta City, Jakarta, Indonesia
wilmasilalahi@fh.untar.ac.id

Abstract

In a constitutional state, every legal product must comply with the Constitution to ensure legal certainty, democracy, and the protection of citizens' constitutional rights. However, the legislative process in Indonesia often faces disharmony, regulatory overlaps, and laws that fail to meet societal needs. This study aims to analyze the mechanisms of legislative review, executive review, and judicial review within the Indonesian legal system and to assess the challenges and solutions in their implementation. The research employs a normative legal method with a conceptual approach, examining constitutional law theories, the principle of checks and balances, and existing statutory regulations, supported by primary and secondary legal sources. The findings reveal that: (1) the three forms of review have distinct meanings, legal foundations, and functions, yet complement each other in safeguarding constitutionalism; (2) each branch of power holds specific authority—legislative review is exercised by the DPR and the President, executive review by ministries and the President, and judicial review by the Constitutional Court and the Supreme Court; (3) significant challenges remain, such as political dominance in legislative review, regulatory disharmony in executive review, and limited access as well as inconsistent rulings in judicial review. The study concludes that although Indonesia has a complete system of legal review, its effectiveness depends on the quality of legislation, institutional coordination, and compliance with judicial decisions. Therefore, this research recommends three key measures: strengthening public legal literacy, enhancing the technical capacity of state institutions, and implementing integrated cross-sector reforms to reinforce transparency, participation, and legal compliance.

Keywords: Legal Norm Review, Legislative Review, Executive Review, Normative Analysis.

Abstrak

Dalam negara hukum, setiap produk hukum harus selaras dengan konstitusi untuk menjamin kepastian hukum, demokrasi, dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Namun, praktik legislasi sering menghadapi masalah disharmoni, tumpang tindih norma, hingga peraturan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme legislative review, executive review, dan judicial review dalam sistem hukum Indonesia serta menilai tantangan dan solusi implementasinya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, yang mengkaji teori negara hukum, prinsip checks and balances, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, didukung bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) ketiga bentuk review memiliki arti, landasan hukum, dan fungsi berbeda tetapi saling melengkapi dalam menjaga konstitusionalitas hukum; (2) mekanisme dan kewenangan masing-masing cabang kekuasaan berbeda—legislatif melalui DPR dan Presiden, eksekutif melalui kementerian dan Presiden, serta yudikatif melalui Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung; (3) praktik pengujian masih menghadapi tantangan serius, seperti dominasi kepentingan politik dalam legislative review, disharmoni regulasi dalam executive review, serta keterbatasan akses dan inkonsistensi putusan dalam judicial review. Kesimpulannya, meskipun sistem pengujian hukum di Indonesia telah lengkap, efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas legislasi, koordinasi kelembagaan, dan kepatuhan terhadap putusan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan tiga hal: penguatan literasi hukum publik, peningkatan kapasitas teknis lembaga negara, serta reformasi integratif lintas sektor untuk memperkuat transparansi, partisipasi, dan kepatuhan hukum.

Kata Kunci: Pengujian Perundang-Undangan, *Legislative Review*, *Executive Review*, *Judicial Review*, Analisis Normatif.

Copyright (c) 2025 Wilma Silalahi, Yunita Estu Lestari

✉Corresponding author: Wilma Silalahi
Email Address: wilmasilalahi@fh.untar.ac.id (Letjen S. Parman St No.1, RT.6/RW.16, Jakarta, Indonesia)
Received 21 September 2025, Accepted 27 September 2025, Published 03 October 2025

PENDAHULUAN

Dalam negara hukum (rechtsstaat), hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen kekuasaan, melainkan menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan. Supremasi konstitusi menempatkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma tertinggi dalam hierarki hukum nasional, sehingga setiap produk hukum harus selaras dengan prinsip konstitusionalitas. Namun dalam praktik, tidak jarang lahir peraturan perundang-undangan yang justru bertentangan dengan konstitusi, menimbulkan ketidakpastian hukum, atau bahkan merugikan hak-hak warga negara.

Untuk mencegah dan memperbaiki keadaan tersebut, diperlukan mekanisme pengujian perundang-undangan. Mekanisme ini tidak hanya menjadi sarana koreksi terhadap kesalahan legislasi, tetapi juga wujud nyata prinsip *checks and balances* antar cabang kekuasaan. Di Indonesia, pengujian perundang-undangan dapat dilakukan melalui tiga jalur utama: legislative review, executive review, dan judicial review. Ketiganya memiliki karakteristik dan prosedur berbeda, namun saling melengkapi dalam menjaga integritas sistem hukum nasional.

1. *Legislative review* dilakukan oleh lembaga legislatif melalui kewenangan revisi, harmonisasi, atau pencabutan undang-undang.
2. *Executive review* dilaksanakan oleh lembaga eksekutif melalui evaluasi, deregulasi, dan pembatalan peraturan pelaksana.
3. *Judicial review* dijalankan oleh lembaga yudikatif, khususnya Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, dengan kewenangan menguji konstitusionalitas undang-undang maupun peraturan di bawah undang-undang.

Urgensi kajian ini semakin tinggi di tengah dinamika politik dan hukum yang kompleks, di mana produk hukum kerap dipengaruhi oleh kompromi politik maupun tekanan publik tanpa kajian akademis yang mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif mekanisme pengujian perundang-undangan melalui legislative review, executive review, dan judicial review, serta menilai efektivitasnya dalam memperkuat prinsip negara hukum, demokrasi, dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan analisis kritis. Fokus utamanya adalah norma hukum yang berlaku dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya mekanisme pengujian yang dijalankan oleh lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yakni menelaah teori-teori hukum tata negara, konsep negara hukum, serta prinsip *checks and balances* dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya mengkaji teks

peraturan perundang-undangan, tetapi juga menghubungkannya dengan konsep-konsep dasar ketatanegaraan yang relevan.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang terkait. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum tata negara, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan laporan lembaga negara.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menelusuri dan mendokumentasikan sumber hukum yang relevan, termasuk arsip laporan lembaga negara serta konten media resmi yang memuat praktik pengujian peraturan perundang-undangan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis normatif, yaitu dengan menelaah kesesuaian antara norma hukum yang tertulis dengan praktik pengujian yang dijalankan oleh lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Analisis ini bertujuan untuk menemukan sejauh mana pengujian perundang-undangan di Indonesia telah selaras dengan prinsip negara hukum dan *checks and balances*.

HASIL DAN DISKUSI

Arti Legislative Review, Executive Review, dan Judicial Review

Legislative review pada hakikatnya merupakan proses evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif maupun eksekutif yang menjalankan fungsi legislasi. Mekanisme ini bertujuan memastikan setiap regulasi yang dibentuk tetap relevan, tidak bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi, dan mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Dasar hukum legislative review dapat ditemukan dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan, serta dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Pasal 8 ayat (5) dari undang-undang tersebut menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh menteri, badan, atau lembaga hanya dapat berlaku apabila diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan. Selain itu, Pasal 96 ayat (4) juga menekankan adanya partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan. Bentuk legislative review di Indonesia dapat dilihat dalam proses deregulasi dan debirokratisasi, misalnya melalui Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, serta harmonisasi regulasi antar kementerian. Meskipun demikian, legislative review kerap menghadapi tantangan berupa potensi dominasi eksekutif, lemahnya koordinasi antar kementerian, dan minimnya mekanisme uji publik.

Berbeda dengan legislative review, executive review lebih menekankan pada evaluasi regulasi yang dilakukan oleh cabang eksekutif, khususnya Presiden dan kementerian atau lembaga teknis. Executive review memiliki karakter administratif sekaligus politis, karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan sehari-hari. Landasan konstitusionalnya juga terdapat dalam Pasal 4

ayat (1) UUD 1945, diperkuat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, terutama Pasal 7 ayat (1) mengenai hierarki peraturan perundang-undangan dan Pasal 99 yang mengatur peraturan pelaksanaan yang harus sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi. Selain itu, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Percepatan Penyusunan Rencana Regulasi dan Deregulasi menegaskan fungsi eksekutif dalam mengendalikan kualitas regulasi. Dalam praktiknya, executive review dilakukan melalui deregulasi, harmonisasi antar kementerian, dan pencabutan peraturan teknis internal yang tidak relevan. Namun, mekanisme ini juga tidak terlepas dari kelemahan berupa potensi penyalahgunaan kekuasaan, lemahnya sinkronisasi antar lembaga, dan minimnya konsultasi publik.

Sementara itu, judicial review merupakan mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan oleh lembaga peradilan untuk menilai kesesuaiannya dengan norma hukum yang lebih tinggi, terutama UUD 1945. Judicial review menegakkan prinsip supremasi konstitusi, checks and balances, serta perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Landasan normatif judicial review tercantum dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, serta Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Judicial review dapat dilakukan secara formil, yakni menilai prosedur pembentukan suatu undang-undang, maupun secara materiil, yaitu menilai substansi norma hukum. Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap konstitusi, sedangkan Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Meskipun kedudukannya sangat penting dalam menjaga konstitusionalitas hukum, praktik judicial review masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan akses masyarakat terhadap mekanisme uji materi, ketidakpatuhan lembaga eksekutif atau legislatif terhadap putusan pengadilan, serta adanya inkonsistensi dalam beberapa putusan yang dikeluarkan.

Ketiga bentuk pengujian memiliki peran yang saling melengkapi :

Mekanisme	**Lembaga Pelaksana**	**Objek Pengujian**	**Kekuatan Hukum**
Legislative Review	DPR/DPD	UU	Politik
Executive Review	Presiden/Kementerian	PP, Perpres, dll	Administratif
Judicial Review	MK/MA	UU dan Peraturan	Konstitusional

Sinergi antar mekanisme ini penting untuk memastikan bahwa peraturan yang berlaku tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan efektif secara sosial. Jika dibandingkan, ketiga mekanisme tersebut memiliki karakteristik yang berbeda namun saling melengkapi. Legislative review bersifat politik-administratif karena erat kaitannya dengan proses pembentukan regulasi oleh lembaga legislatif dan eksekutif. Executive review bersifat administratif karena dijalankan oleh lembaga pemerintahan untuk menjamin efektivitas regulasi dalam pelaksanaan kebijakan. Judicial review, di sisi lain, memiliki

kekuatan hukum konstitusional karena putusan Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat. Oleh karena itu, sinergi ketiga mekanisme ini sangat penting agar sistem hukum Indonesia tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil, transparan, dan efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Mekanisme dan Kewenangan dalam Legislative Review, Executive Review, dan Yudikatif Review

Mekanisme legislative review pada dasarnya dijalankan melalui kewenangan lembaga legislatif dalam mengevaluasi, merevisi, maupun mencabut suatu undang-undang. Dalam konteks Indonesia, kewenangan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Presiden sebagai pemegang kekuasaan pembentukan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Apabila ditemukan norma yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, DPR bersama Presiden dapat menggunakan kewenangan legislasi untuk melakukan perubahan atau pencabutan undang-undang. Mekanisme ini juga dilengkapi dengan fungsi pengawasan DPR, di mana melalui rapat kerja maupun panitia khusus, DPR dapat menilai efektivitas pelaksanaan suatu undang-undang dan memberikan rekomendasi revisi. Dengan demikian, legislative review di Indonesia lebih menekankan pada mekanisme politik dan administratif melalui proses legislasi formal.

Executive review memiliki mekanisme yang berbeda karena dijalankan oleh cabang kekuasaan eksekutif dalam bentuk penataan regulasi teknis. Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan pemerintah, peraturan presiden, serta menginstruksikan menteri untuk meninjau dan mencabut peraturan yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Ketentuan ini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menetapkan hierarki norma hukum. Dalam praktiknya, mekanisme executive review dilakukan melalui harmonisasi, sinkronisasi, dan klarifikasi regulasi oleh Kementerian Hukum dan HAM bersama kementerian terkait. Presiden juga dapat mengeluarkan Instruksi Presiden, seperti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2021, yang memerintahkan kementerian dan lembaga untuk meninjau ulang regulasi agar tidak menimbulkan tumpang tindih. Dengan demikian, executive review bersifat administratif karena ditujukan untuk menjaga konsistensi regulasi di tingkat pelaksanaan pemerintahan.

Sementara itu, judicial review merupakan mekanisme pengujian norma hukum oleh lembaga yudikatif yang bersifat konstitusional. Kewenangan ini dibagi menjadi dua lembaga utama, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa MK berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sedangkan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa MA berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Mekanisme judicial review di MK dapat diajukan oleh pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana diatur dalam Pasal 51

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Permohonan judicial review di MA diajukan terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang dinilai bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan judicial review bersifat final dan mengikat, yang berarti tidak dapat diganggu gugat serta berlaku bagi semua pihak.

Dari uraian tersebut terlihat bahwa ketiga mekanisme review memiliki dasar kewenangan yang berbeda. Legislative review bersandar pada fungsi legislasi DPR bersama Presiden melalui proses perubahan dan pencabutan undang-undang. Executive review dijalankan oleh Presiden dan kementerian dalam bentuk penataan peraturan teknis agar selaras dengan norma hukum yang lebih tinggi. Judicial review, berbeda dengan keduanya, menegakkan supremasi konstitusi melalui kewenangan yudikatif dalam menilai kesesuaian norma hukum terhadap UUD 1945 maupun undang-undang. Ketiga mekanisme ini saling melengkapi dalam sistem hukum Indonesia karena membentuk pola pengawasan berlapis antara cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam rangka menjaga prinsip negara hukum dan checks and balances.

Tantangan dan Solusi dalam Praktik Legislative Review, Executive Review, dan Yudikatif Review

Praktik legislative review di Indonesia menghadapi beberapa tantangan mendasar yang berkaitan dengan proses politik, kapasitas teknis, dan keterlibatan publik. Secara politis, fungsi legislative review yang melekat pada DPR sering mengalami tekanan kepentingan politik dan bargaining politik sehingga proses revisi atau pencabutan undang-undang tidak selalu berorientasi pada evaluasi teknis atau kepentingan publik jangka panjang. Dari sisi teknis, kualitas naskah akademik, RUU, dan kemampuan drafting hukum di tingkat legislatif kerap belum memadai sehingga RUU yang dihasilkan berisiko mengandung ketidakjelasan norma, delegasi kewenangan yang berlebihan, atau dampak regulatori yang tidak terukur. Keterbatasan sumber daya riset dan ketiadaan mekanisme evaluasi dampak yang sistematik (Regulatory Impact Assessment/RIA) memperparah kondisi ini. Selain itu, mekanisme partisipasi publik yang diatur secara normatif (mis. ketentuan partisipasi menurut UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) sering kali belum diwujudkan secara substansial sehingga legitimasi sosial terhadap perubahan atau pembentukan undang-undang menjadi lemah. Tantangan-tantangan ini menyebabkan legislative review berpotensi menghasilkan revisi yang reaktif atau politis, bukan berdasarkan analisis kebutuhan hukum dan manfaat publik yang komprehensif.

Untuk mengatasi persoalan tersebut diperlukan paket solusi yang bersifat institusional dan teknis. Pertama, perlu penguatan kapasitas drafting dan analisis di internal DPR, khususnya Badan Legislasi (Baleg) dan biro hukum, melalui pembentukan unit riset independen berstandar RIA yang mampu melakukan analisis ekonomi-hukum, evaluasi biaya-manfaat, dan studi banding. Kedua, mewajibkan RIA dan Naskah Akademik yang memenuhi standar metodologis sebagai prasyarat bagi setiap RUU yang diajukan, disertai kewajiban publikasi draf dan ringkasan RIA untuk uji publik sebelum pengambilan keputusan. Ketiga, memperkuat mekanisme pengawasan pasca-legislasi melalui komite

monitoring DPR yang bertugas mengevaluasi dampak implementasi undang-undang secara berkala (ex-post evaluation) dan mendorong penggunaan klausul "sunset" atau peninjauan berkala untuk norma-norma yang berisiko usang. Keempat, menjadikan proses legislative review lebih transparan melalui platform daring yang memuat draf RUU, komentar publik, dan rekam jejak amandemen sehingga tekanan politik dapat diimbangi dengan kontrol publik dan akuntabilitas.

Executive review juga menyajikan tantangan tertentu yang berkaitan dengan sifat administratif dan hirarkis pelaksanaannya. Karena bersifat administratif, executive review rawan dipersepsikan sebagai tindakan sepihak terutama ketika pencabutan atau perubahan regulasi dilakukan melalui instruksi eksekutif tanpa dialog yang memadai dengan DPR atau pemangku kepentingan. Koordinasi antarkementerian yang lemah sering memunculkan disharmoni norma (peraturan konflik atau tumpang tindih), apalagi di era delegasi kewenangan yang luas kepada menteri atau kepala lembaga. Keterbatasan kapasitas analitis di tingkat kementerian, inkonsistensi penerapan standar uji legalitas peraturan pelaksana, serta kurangnya mekanisme monitoring eksperimental (mis. pilot testing atau regulatory sandbox untuk kebijakan baru) juga menjadi hambatan sehingga regulasi yang "deregulatif" dapat berujung pada celah hukum atau dampak negatif yang tidak terprediksi.

Solusi untuk meningkatkan kualitas executive review menuntut kombinasi reformasi proses dan penguatan kelembagaan. Pertama, memperkuat peran Kementerian Hukum dan HAM sebagai gatekeeper legal drafting dengan mandat yang jelas untuk melakukan RIA dan harmonisasi sebelum peraturan turun-level disahkan; hal ini termasuk pemberian otoritas teknis untuk menolak peraturan teknis yang bertentangan dengan prinsip hierarki norma. Kedua, menginstitusikan mekanisme koordinasi lintas sektor yang bersifat permanen—misalnya inter-ministerial working group dengan TOR yang menuntut kesepakatan sinkronisasi dan jadwal harmonisasi—agar rancangan peraturan mendapat kajian lintas-sektor sejak dini. Ketiga, mewajibkan publikasi draf peraturan pelaksana dan periode konsultasi publik yang bermakna (bukan formalitas), disertai format ringkasan dampak bagi publik sehingga partisipasi masyarakat dapat dilaksanakan secara efektif. Keempat, memperkenalkan praktik ex-post review dan sunset clause pada peraturan pelaksana untuk menilai apakah deregulasi memberikan manfaat yang diharapkan; bila perlu, gunakan pilot implementation dan regulatory sandbox untuk kebijakan yang berdampak tinggi sebelum penyebaran nasional. Kelima, menjamin adanya dokumentasi yang terpusat (single regulatory registry) sehingga seluruh kementerian dan publik dapat menelusuri katalog peraturan dan status harmonisasinya.

Praktik judicial review, meskipun merupakan pilar penegakan supremasi konstitusi, juga menemui persoalan serius yang berimplikasi pada efektivitas fungsi pengawasan yudisial. Salah satu tantangan utama adalah akses terhadap mekanisme judicial review: hambatan biaya, kompleksitas prosedur, dan persyaratan kedudukan hukum (standing) menyebabkan hanya kelompok yang relatif mampu yang dapat mengajukan pengujian konstitusional, sehingga potensi pembedaan akses terhadap keadilan menjadi nyata. Kendala kedua adalah implementasi putusan: putusan Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung yang membatalkan atau menafsirkan norma tidak selalu diikuti dengan tindakan

legislatif/eksekutif yang cepat sehingga terjadi vakum hukum atau ketidakpastian implementatif. Tantangan ketiga adalah inkonsistensi yurisprudensi dan ketidakharmonisan putusan antara lembaga peradilan (MK vs MA), yang menimbulkan kebingungan norma serta melemahkan kepastian hukum. Selain itu, tantangan kelembagaan seperti keterbatasan sumber daya hakim dan panitera, backlog perkara, serta tekanan politik terhadap institusi peradilan dapat mengganggu independensi dan kualitas putusan.

Untuk memperbaiki praktik judicial review perlu diterapkan solusi yang menyentuh aspek akses, implementasi, dan harmonisasi yudisial. Demi meningkatkan akses, sistem peradilan konstitusional perlu memperluas mekanisme standing melalui pengakuan kepentingan publik dan litigasi kepentingan umum (public interest litigation), memperluas ketersediaan bantuan hukum (legal aid) pada perkara konstitusional, serta menyederhanakan prosedur administratif untuk pengajuan. Kebijakan penerimaan amicus curiae dan partisipasi akademik harus difasilitasi agar pengadilan memperoleh perspektif analitis yang lebih kaya. Dalam hal implementasi putusan, perlu dibuat mekanisme tindak lanjut formal: misalnya kewajiban pelapor dan pelacakan oleh lembaga negara (Presiden/DPR/Kementerian) untuk melaporkan langkah korektif dalam jangka waktu tertentu setelah putusan MK, serta kewajiban penyusunan RUU pengganti atau penyesuaian peraturan pelaksana bila putusan menyatakan norma bertentangan. Pembentukan unit monitoring independen—bisa berupa unit di Sekretariat Negara, DPR, atau badan eksternal seperti Ombudsman—yang memantau kepatuhan terhadap putusan yudisial akan menambah tekanan administratif untuk pelaksanaan. Untuk mengatasi inkonsistensi putusan, perlu ada forum koordinasi antarperadilan (judicial dialogue) yang bertujuan menyelaraskan metode penafsiran, berbagi best practice, dan menghasilkan pedoman interpretatif yang bersifat referensial; publikasi yurisprudensi lengkap dan repertorium putusan yang dapat diakses akan mendukung konsistensi dan kepastian hukum.

Selain solusi spesifik per mekanisme, terdapat solusi lintas-sistem yang harus diadopsi untuk menjamin keterpaduan dan efektivitas pengujian perundang-undangan. Pertama, pembangunan satu sistem manajemen regulasi terintegrasi (one single regulatory management system) yang mencakup pra-penyusunan (ex-ante RIA), proses pembuatan (draf terbuka dan uji publik), dan evaluasi pasca-implementasi (ex-post evaluation and sunset review) untuk semua level peraturan (pusat dan daerah). Kedua, peningkatan kapasitas pembentuk regulasi di seluruh tingkatan melalui pelatihan drafting, RIA, dan teknik harmonisasi norma; program ini harus direncanakan jangka menengah dan melibatkan akademisi serta praktisi. Ketiga, memperkuat transparansi dan partisipasi publik melalui platform daring yang memuat seluruh draf peraturan, ringkasan RIA, hasil konsultasi, dan agenda harmonisasi sehingga masyarakat sipil, akademisi, dan sektor bisnis dapat memberi masukan bermakna. Keempat, memperjelas dan membatasi delegasi kewenangan pembuatan peraturan pelaksana dalam undang-undang agar tidak terjadi ‘kelebihan delegasi’ yang menimbulkan celah hukum dan potensi penyalahgunaan. Kelima, pembentukan kultur konstitusional: program pendidikan hukum publik dan

kampanye literasi hukum yang konsisten akan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak konstitusional dan mekanisme pengujian hukum sehingga mendorong pengawasan publik yang sehat.

Secara ringkas, tantangan pada ketiga mekanisme—legislative review yang politis dan berisiko kualitas teknis rendah; executive review yang administratif tetapi rawan tindakan sepihak dan disharmoni norma; serta judicial review yang instrumentally kuat namun menghadapi akses, implementasi, dan konsistensi—memerlukan kombinasi solusi teknis, kelembagaan, dan budaya hukum. Reformasi yang terintegrasi, mulai dari mewajibkan RIA dan uji publik pada semua tahapan legislatif dan eksekutif, penguatan peran gatekeeper (seperti Kementerian Hukum dan HAM), peningkatan kapasitas legislator dan aparatur, hingga mekanisme tindak lanjut yang memaksa untuk putusan yudisial, akan memperkuat fungsi pengujian perundang-undangan secara keseluruhan. Upaya-upaya tersebut harus didesain untuk saling memperkuat sehingga legislative review, executive review, dan judicial review tidak berdiri sendiri melainkan membentuk ekosistem pengawasan hukum yang koheren, efektif, dan berorientasi pada perlindungan hak serta kepentingan publik.

KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa : Pertama, mengenai arti dan landasan normatif dari legislative review, executive review, dan judicial review, dapat disimpulkan bahwa ketiga mekanisme tersebut merupakan instrumen pengawasan hukum yang berbeda namun saling melengkapi. Legislative review berfungsi dalam ranah politik-administratif melalui DPR dan Presiden yang bersama-sama membentuk dan mengevaluasi undang-undang. Executive review beroperasi dalam ranah administratif dengan Presiden dan kementerian sebagai pelaksana, menata regulasi pelaksana agar selaras dengan norma yang lebih tinggi. Judicial review memiliki kekuatan konstitusional, dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung untuk memastikan supremasi UUD 1945 serta menjaga konsistensi hierarki hukum. Keseluruhan mekanisme ini menunjukkan adanya lapisan pengawasan berjenjang demi mewujudkan prinsip checks and balances.

Kedua, mengenai mekanisme dan kewenangan, disimpulkan bahwa setiap cabang kekuasaan memiliki peran khas yang tidak dapat saling menggantikan. DPR bersama Presiden memegang kewenangan legislasi formal untuk melakukan revisi atau pencabutan undang-undang, eksekutif melalui Presiden dan kementerian menjalankan penataan regulasi teknis dan sinkronisasi, sementara kekuasaan kehakiman menilai keabsahan norma melalui putusan yang bersifat final dan mengikat. Perbedaan kewenangan ini memperlihatkan sistem hukum Indonesia yang dirancang agar setiap produk hukum diuji melalui tiga lapisan berbeda: politik, administratif, dan konstitusional.

Ketiga, mengenai tantangan dalam praktik, disimpulkan bahwa legislative review masih dibayangi kepentingan politik dan keterbatasan teknis, executive review menghadapi disharmoni antar kementerian dan potensi dominasi eksekutif, sementara judicial review menghadapi masalah akses keadilan, ketidakpatuhan terhadap putusan, serta inkonsistensi yurisprudensi. Tantangan-tantangan tersebut menunjukkan bahwa meskipun sistem review sudah lengkap secara kelembagaan,

efektivitasnya masih bergantung pada kualitas sumber daya, akuntabilitas politik, serta kepatuhan lembaga negara dalam menjalankan fungsi pengawasan hukum.

Adapun saran yang diberikan penulis yakni Pertama, terkait arti dan fungsi legislative, executive, dan judicial review, disarankan agar pemerintah dan pembentuk undang-undang memperkuat literasi hukum publik serta memperjelas batas kewenangan masing-masing lembaga. Edukasi hukum masyarakat melalui program literasi konstitusional dapat membantu memperluas partisipasi publik dalam legislative review maupun executive review, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan judicial review sebagai mekanisme perlindungan hak konstitusional.

Kedua, terkait mekanisme dan kewenangan, disarankan agar dilakukan penguatan peran teknis di setiap lembaga. DPR perlu membangun unit analisis regulasi yang independen untuk mendukung legislative review berbasis kajian akademik, eksekutif perlu memperluas penerapan harmonisasi dan *regulatory impact assessment*, sementara lembaga yudikatif perlu meningkatkan kapasitas hakim dan konsistensi interpretasi. Dengan demikian, perbedaan mekanisme dapat benar-benar berfungsi sebagai *checks and balances* dan tidak saling tumpang tindih.

Ketiga, terkait tantangan dalam praktik, disarankan adanya reformasi lintas sektor yang terintegrasi. Legislative review perlu transparansi lebih besar melalui platform daring yang memuat draf undang-undang dan hasil konsultasi publik, executive review perlu memperkuat koordinasi antar kementerian serta mekanisme ex-post review, sementara judicial review harus dilengkapi dengan prosedur yang lebih sederhana, akses bantuan hukum yang lebih luas, serta mekanisme formal tindak lanjut putusan oleh DPR maupun eksekutif. Dengan langkah ini, efektivitas pengujian perundang-undangan dapat meningkat sehingga hukum tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian sekaligus penyusunan artikel ini.

REFERENSI

Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar ilmu hukum tata negara.* Jakarta: Rajawali Pers.

Aziz, M. (2010). Pengujian peraturan perundang-undangan dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia. *Jurnal Konstitusi, 7*(5), 137.

Bimaptr. (2024, Desember 3). Karakteristik executive review, legislative review, dan judicial review.

Clolidin, N. (2020, April). *Judicial review di Amerika Serikat, Jerman, dan Indonesia. Jurnal Hukum Progresif.*

Humas dan Kerja Sama. (2024, Juni 5). Kapusren BPHN: Kunci penyederhanaan regulasi adalah perencanaan ketat, deregulasi, dan omnibus law.

Kompasiana. (2025, April 2). Mengenal mekanisme pengajuan norma hukum: *Judicial review, legislative review,* dan *executive review.*

Kompasiana. (2025, Juli 3). Analisis konsep negara hukum dalam konstitusi Indonesia: Perspektif historis dan perkembangan.

Mochmud, A. (2023, Oktober 11). *Pengujian peraturan perundang-undangan dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia.*

Mahfud MD. (2009). *Politik hukum di Indonesia.* Jakarta: LP3ES.

Montesquieu. (1949). *The spirit of laws* (T. Nugent, Trans.). New York: Hafner Publishing Company. (Karya asli diterbitkan tahun 1748).

Mau, H. A., & Ditisrama, T. (2024). *Hukum tata negara Indonesia: Teori dan penerapan.* Jakarta: Amerta Media.

Asshiddiqie, J. (n.d.). *Gagasan negara hukum Indonesia.*

Siallagan, H. (2016). Penerapan prinsip negara hukum di Indonesia. *Jurnal Sosiohumaniora, 18*(2), 131–132.

Tiara Amanda, P. (2025, Januari 30). Arti *judicial review, legislative review,* dan *executive review. Hukumonline.*

Tristam Pascal, M. (2023, Januari 17). Upaya menggantang asap deregulasi dan debirokratisasi.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (n.d.). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.